

Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta

Nurdin^{1*}, Fatkhuri¹

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia

*Email: nurdin252005@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat keterwakilan politik para kader partai politik perempuan di lembaga legislatif daerah masih belum mencapai angka minimal 30%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal dan eksternal yang menghambat kemajuan kader perempuan untuk bersaing dengan kader laki-laki. Hambatan dan tantangan yang dihadapi kader perempuan ini salah satunya dikarenakan kapasitas kepemimpinan yang masih lemah. Kader perempuan tidak dapat bersaing dengan kader laki-laki dalam kontestasi pemilihan umum legislatif provinsi. Para kader harus dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan bila ingin dapat bersaing dengan kader laki-laki. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader partai politik perempuan sebagai strategi untuk memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah pendidikan, pelatihan dan simulasi. Hasil yang dicapai memperlihatkan bahwa peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam menyusun strategi pemenangan pemilihan umum legislative untuk periode selanjutnya.

Kata Kunci: kader partai politik perempuan, kapasitas, kepemimpinan, pemilu legislatif, strategi

ABSTRACT

The level of political representation of female political party cadres in regional legislatures has not yet reached a minimum of 30%. This condition is caused by various internal and external factors that hinder the progress of female cadres to compete with male cadres. One of the obstacles and challenges faced by these female cadres is the weak leadership capacity. Female cadres cannot compete with male cadres in the contestation for the provincial legislative elections. The cadres must be able to increase their leadership capacity if they want to be able to compete with male cadres. The purpose of this training is to increase the leadership capacity of female political party cadres as a strategy to win seats in the DKI Jakarta Provincial House of Representatives. The methods used are education, training and simulation. The results achieved show that the training participants have gained understanding and skills in formulating strategies for winning the legislative elections for the next period.

Keywords: female political party cadres, capacity, leadership, legislative elections, strategy

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i4.209>



PENDAHULUAN

Keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih didominasi oleh anggota laki-laki. Hasil Pemilu Legislatif 2019 memperlihatkan bahwa kader partai politik perempuan masih sulit untuk bersaing dengan kader laki-laki dalam meraih kekuasaan di parlemen regional atau DPRD. Keterwakilan kader partai politik perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 hanya mencapai 21,69% atau 23 anggota dari 106 anggota. Persentase ini masih berada di bawah 30% keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta.

Keterwakilan perempuan di badan legislatif daerah DKI Jakarta berasal dari berbagai partai politik. Terdapat 10 partai politik yang berhasil memperoleh kursi yaitu PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, PPP, PSI, PAN dan Demokrat. PDI-P menjadi partai politik yang berhasil menempatkan kader partai perempuan di lembaga legislatif terbanyak yaitu 11 anggota (47,82%). PAN menjadi partai yang hanya dapat menempatkan 1 anggota (4,34%). Sementara PKB, Golkar, NasDem, dan PPP tidak memiliki wakil (anggota) perempuan (0%) di DPRD DKI Jakarta (data lengkap dapat dilihat pada tabel 1. di bawah).

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu 2019 di DPRD Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PKB	5	0	5
2.	Gerindra	17	2	19
3.	PDI-P	14	11	25
4.	Golkar	6	0	6
5.	NasDem	7	0	7
6.	PKS	13	3	16
7.	PPP	1	0	1
8.	PSI	6	2	8
9.	PAN	8	1	9
10.	Demokrat	6	4	10
Jumlah		83	23	106

Sumber: KPU DKI Jakarta, 2019

Dinamika pembangunan politik gender pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019 di Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Secara kuantitatif tidak ada kenaikan yang melampaui angka 30% sebagai ambang batas keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2009 persentase keterwakilan perempuan di badan legislatif provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 23,40% (22 anggota), menurun menjadi 17,92% di Pemilu 2014, dan naik kembali ke angka 21,69% pada Pemilu 2019 (lihat tabel 2 dibawah).

Tabel 2. Dinamika Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2009, 2014 dan 2019

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2009	72 (76,60%)	22 (23,40%)	94 (100%)
2014	87 (82,02%)	19 (17,92%)	106 (100%)
2019	83 (78,30%)	23 (21,69%)	106 (100%)

Sumber: KPU DKI Jakarta, 2019

Rendahnya keterpilihan kader partai politik perempuan yang mencalonkan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan politik. Hal ini menjadi urgensi bagi kader partai politik perempuan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang politik untuk mengejar, mensetarakan dan meminimalisasi dominasi laki-laki di badan legislatif (Soeharto, 2011;1). Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dan tugas partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kader partai politik. Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam mempersiapkan kader partai politik untuk berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif. Pendidikan politik akan memberikan pengetahuan kepada para kader partai politik untuk dapat memahami dan menyusun strategi untuk menarik simpati para pemilih di daerah pemilihan (*constituency*). Peningkatan pemahaman politik baik nasional dan regional penting untuk dimiliki oleh setiap kader partai politik. Partai politik di Indonesia masih terkendala dalam mempersiapkan dan melakukan pendidikan politik bagi kader. Konsekuensinya adalah kader tidak memahami strategi kemenangan dan lebih melakukan aktifitas pragmatis untuk mendapatkan suara pemilih (Vina Salviana Darvina Soedarwo, 2015, p. 1). Pendidikan politik menjadi strategi partai politik untuk meningkatkan loyalitas kader terhadap partai politik (Hariyanti, 2018b, p. 1). Pendidikan politik secara langsung dapat mempengaruhi para kader untuk memiliki sikap yang kuat untuk dapat memenangkan partai politik dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional dan daerah (Ahmad & Suryadi, 2020, p. 1). Selain itu pendidikan politik juga diharapkan dapat membangun sikap tanggungjawab kader partai untuk membesarkan partai dan menjaga integritas negara dan kewarganegaraan (Hijran, 2018, p. 1).

Pendidikan politik menjadi instrumen penting bagi partai politik berperan dalam meningkatkan kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan politik memungkinkan partai politik untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan pencalonan kader perempuan (Dickson Omondi, 2016; Nurdin, 2021, p. 1). Dengan demikian, pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu. Salah satu strategi yang diaplikasikan oleh kader partai politik perempuan adalah dengan menguatkan kapasitas komunikasi dengan konstituen (Jandevi, 2019, p. 68).

Tentunya partai politik sebagai institusi politik memiliki peran dan kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan kader partai politik termasuk kader perempuan (Hariyanti, 2018a, p. 74). Meskipun penyelenggaraan pendidikan politik menjadi kewajiban dari partai politik namun ini juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa partai politik yang sudah memiliki organisasi yang mapan dapat menyelenggarakan pendidikan politik secara eksklusif. Partai politik di Indonesia seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan pendidikan politik bagi para kader mereka (Soedarwo, 2020, pp. 51–53). Penyelenggaraan Pendidikan politik juga dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat berbasis organisasi perempuan telah memiliki agenda rutin untuk melaksanakan pendidikan politik. Kecendrungan peningkatan peran masyarakat dalam meningkatkan kapasitas politik kader partai politik perempuan mulai

dipertimbangkan. Kelompok aktivis perempuan, misalnya, telah melakukan pendidikan politik bagi kader perempuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok ini adalah untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan untuk dapat bersaing dengan kader laki-laki dalam memperebutkan kursi di lembaga legislatif daerah (Roviana, 2015, p. 119). Kegiatan pendidikan partai politik mendapat perhatian yang utama dari kelompok perempuan yang memiliki afiliasi atau keterikatan dengan partai politik tertentu. Kelompok ini bertujuan sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kader partai politik perempuan dalam rangka persiapan pemilihan umum (Agustin & Sari, 2016, p. 1078; Sinta, 2017, p. 62).

Pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan kader partai politik, termasuk kader partai politik perempuan, yang memiliki kapasitas kepemimpinan di bidang politik (Hariyanti, 2018b). Pengembangan kapasitas secara umum didefinisikan sebagai hak setiap warga, termasuk perempuan, untuk mendapatkan sumber daya ekonomi, sosial dan politik dan lain sebagainya untuk menguatkan kapasitas diri dengan tujuan profesionalitas (Sweetman, 2000, p. 16). Salah satu bentuk pengembangan kapasitas adalah bagaimana membangun kapasitas (*capacity building*) individu dan kelompok di dalam masyarakat. Membangun kapasitas dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas) individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Pembangunan kapasitas ini secara umum terkait dengan aktifitas berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan kemampuan kompetensi atau keterampilan bagi individu tau kelompok untuk mewujudkan potensi dalam kehidupan (Santhosh Kumar, 2012, pp. 235–236).

Dalam perspektif kelembagaan, membangun kapasitas perempuan merupakan bagian dari cara mengatasi berbagai penghalang yang harus dihadapi perempuan. Berbagai lembaga nasional dan internasional telah mendukung kursus pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Lembaga-lembaga ini mendukung program peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan asertif untuk menjadi pemimpin di dalam masyarakat (Sweetman, 2000, pp. 4–5). Program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap transformasi masyarakat. Selain itu hasil transformasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian (pemerintah) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan (Wakahiu and Keller, 2011, p. 130).

Membangun kapasitas kepemimpinan perempuan di bidang politik merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender di badan legislatif. Pembangunan kapasitas perempuan dapat dilakukan melalui pengembangan program yang ditujukan untuk membantu kapasitas diri kandidat perempuan. Dengan penguatan kapasitas diri, kader perempuan dilatih serta dimentori strategi dalam memenangkan kursi di badan legislatif (Krook & Norris, 2014, p. 6). Dalam kasus di Indonesia umumnya dan DKI Jakarta khususnya kelemahan kader partai politik perempuan adalah masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan kader laki-laki untuk memperebutkan kursi di lembaga legislatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa perempuan masih lemah dalam hal kepemimpinan publik bila dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian kader partai politik perempuan yang ingin mencalonkan diri untuk bersaing di pemilihan anggota legislatif perlu dibekali dengan program peningkatan kapasitas kepemimpinan (Asmorojati & Muhammadi, 2021, p. 31).

Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dapat dilakukan oleh partai politik, pemerintah/ pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Pengembangan

kapasitas politik menjadi penting untuk dikembangkan dan dilaksanakan secara regular dan periodik oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dampak positif program pelatihan kepemimpinan bagi kader partai perempuan yaitu peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik pusat dan daerah (Paryati, 2021, p. 135).

Dengan mempertimbangan rumusan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis perlu melakukan kajian terkait dengan pembangunan kapasitas kepemimpinan politik kader partai perempuan. Tim melakukan kajian ilmiah ini didasarkan pada permasalahan yang menjadi objek kajian yaitu masih rendahnya kepemimpinan politik para kader partai politik perempuan di Provinsi DKI Jakarta. Kajian akademik ini penting untuk disusun sebagai bahan referensi dalam mempelajari dan meneliti terkait dengan fenomena masih rendahnya kapasitas kepemimpinan politik kader partai politik perempuan. Dalam kasus DKI Jakarta, para kader perempuan dari berbagai partai politik masih belum mampu untuk bersaing dan berkompetisi dengan kader laki-laki. Tim menganalisa bahwa permasalahan ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas kepemimpinan politik untuk menyusun strategi kemenangan dalam pemilihan umum legislatif. Sehingga tim mengusulkan suatu solusi terhadap permasalahan ini berupa kegiatan pendidikan politik. Kegiatan ini memfokuskan pada pemaparan materi atau bahan ajar yang dapat membantu para kader partai politik perempuan di DKI Jakarta dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan keterampilan kepemimpinan politik. Keterampilan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para kader partai perempuan dalam berkompetisi dengan kader laki-laki dalam pemilihan umum anggota legislatif daerah.

METODE

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui pendidikan, pelatihan dan simulasi. Kesepakatan ini dicapai setelah tim melakukan diskusi dengan mitra yang mendasarkan pada identifikasi masalah. Tim pengabdian kepada masyarakat menentukan model kegiatan pendidikan, pelatihan dan simulasi dengan pendekatan teori dan praktik. Pendekatan teori ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan konsep dan teori kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pemilu. Pengetahuan ini penting untuk dipahami karena akan memberikan keterampilan dasar dalam konteks penyusunan strategi dalam kontestasi pemilu. Sementara pendekatan praktik ditujukan untuk memperkaya pengalaman para kader partai politik perempuan. Model yang digunakan adalah dengan melakukan simulasi baik individu dan kelompok dalam mempersiapkan strategi kemenangan pemilu legislatif dengan merujuk pada kasus-kasus pemilu. Kasus-kasus ini diklasifikasikan dalam hal keberhasilan serta penanganan sengketa pemilu.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh tim dan mitra untuk mensukseskan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim bekerjasama dengan mitra berdiskusi terkait tahapan yang akan dilaksanakan. Hasil diskusi mensepakati 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada tahapan persiapan tim dan mitra melakukan penyusunan jadwal kegiatan, sosialisasi kegiatan kepada sasaran program, penyediaan alat peraga, dan penyusunan materi pelatihan. Pada tahapan pelaksanaan merupakan kegiatan inti dan paling menentukan. Pada tahapan akan meliputi pengenalan peserta dan fasilitator, pemaparan materi, diskusi kelompok, dan praktik dalam model simulasi. Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Pada tahapan ini tim dan mitra akan mengukur tingkat keberhasilan pelatihan.

Tingkat keberhasilan ini dapat diukur dari keaktifan para peserta di setiap diskusi kelompok. Selain itu keberhasilan pelatihan ini juga diukur dari pemahaman dalam praktik simulasi terhadap kasus-kasus yang didiskusikan serta penyelesaian masalah oleh kelompok (*problem solving*).

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada para kader partai politik perempuan di DKI Jakarta. Keterampilan praktis ini akan menjadi pengetahuan dasar yang penting dikuasai para kader dalam rangka kontestasi pemilihan anggota legislatif provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 4 (empat) hari mulai dari 24 s.d. 27 Februari 2020 bertempat di Kinasih Resort & Conference, Jalan Raya Sukabumi KM. 17, Caringin Bogor—Provinsi Jawa Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta kader partai politik perempuan yang berasal dari unsur partai politik di Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hasil kerjasama antara tim dan mitra. Tim ini terdiri dari panitia dan narasumber/fasilitator dan mediator. Mitra yang menjadi sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan pendidikan politik ini berasal dari berbagai kader partai politik perempuan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik ini dapat diuraikan dalam beberapa proses dan tahapan.

Mitra peserta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pelatihan ini merupakan kader partai politik perempuan. Para kader partai perempuan ini diundang oleh tim (panitia) untuk dapat hadir dan terlibat aktif dalam pelatihan. Para kader perempuan ini berasal baik dari tingkat DPW (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Dari 50 peserta mitra yang diundang untuk mengikuti pelatihan, maka hanya 5 kader partai perempuan yang tidak dapat hadir. Mereka adalah kader partai perempuan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (untuk lebih rinci lihat tabel 3 di bawah).

Tabel 3. Mitra Peserta Pendidikan Politik Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Provinsi DKI Jakarta

No.	Partai Politik	Jumlah	Utusan
1.	PKB	5	DPW
2.	Gerindra	5	DPD
3.	PDI-P	5	DPD
4.	Golkar	5	DPD
5.	NasDem	5	DPD
6.	PKS	5	DPW
7.	PPP	5	DPW
8.	PSI	-	-
9.	PAN	5	DPW
10.	Demokrat	5	DPD

Pembahasan

Pembahasan pelaksanaan kegiatan ini dapat dirinci mulai dari target/sasaran peserta, materi pelatihan, diskusi kelompok dan simulasi. Materi pelatihan merupakan bahan ajar yang terdiri dari beberapa tema dan sub tema terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan. Materi dan bahan ajar ini disajikan dengan perspektif gender. Fokus materi-materi ini adalah membahas konsep dan teori kapasitas kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan politik

hususnya. Tim menyajikan materi-materi pelatihan ditujukan untuk menguatkan pemahaman terhadap konsep dan teori kepada mitra. Materi-materi ini penting untuk difahami karena akan memberikan pemahaman dasar terkait kepemimpinan. Materi-materi yang diberikan terbagi menjadi 6 (enam) tema dengan tujuan dan output yang ingin dicapai selama pelatihan (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 4 di bawah).

Tabel 4. Materi Pendidikan Politik Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Provinsi DKI Jakarta

No.	Materi	Tujuan	Output
1.	Aspek Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kapasitas Kebangsaan Berperspektif Gender	Memberikan pemahaman terkait dengan beberapa kebijakan responsif gender pemerintah	Peserta memiliki kapabilitas dalam menganalisa kebijakan publik yang responsif gender
2.	Pengarusutamaan Gender dalam Prinsip dan Praktik Politik Formal	Memberikan pengetahuan berupa konsep dan teori pengarusutamaan gender dalam bidang politik	Peserta memiliki kapasitas untuk meningkatkan peran di dalam politik formal
3.	Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik	Memberikan pengetahuan baik konsep dan teori keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif serta partai politik	Peserta memiliki kapasitas kepemimpinan di bidang politik formal
4.	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Politik Kebangsaan di Era Globalisasi	Memberikan pengetahuan politik kebangsaan di era globalisasi	Peserta memiliki kapasitas kepemimpinan di bidang politik kebangsaan
5.	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Kebijakan Afirmatif dalam Mendukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik	Memberikan pengetahuan terkait kebijakan afirmatif pemerintah di bidang politik baik eksekutif, legislative dan yudikatif	Peserta memiliki kapasitas kepemimpinan di Lembaga pemerintahan eksekutif, legislative dan yudikatif
6.	Membangun Potensi Kepercayaan Diri dalam Wadah Organisasi Perempuan	Memberikan pengetahuan praktis dalam membangun kapasitas kepemimpinan perempuan dalam berorganisasi	Peserta memiliki kapasitas kepemimpinan bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik

Diskusi kelompok merupakan bagian dari pendekatan/metode dengan mendasarkan pada praktik. Diskusi kelompok ini ditujukan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mitra terhadap materi-materi yang telah diberikan oleh tim. Dalam diskusi kelompok ini mitra dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Tema penting yang menjadi pokok pembahasan dalam diskusi adalah terkait dengan kapasitas. Tim memberikan 4 (empat) tema kapasitas kepemimpinan yang harus dibahas oleh kelompok. Mitra dalam diskusi ini membahas kapasitas kepemimpinan mulai dari politik, sosial, ekonomi dan budaya. Setiap tema membahas permasalahan dan mitra diinstruksikan untuk mendiskusikan jalan keluar sebagai solusi (untuk detail dapat dilihat pada tabel 5 di bawah).

Tabel 5. Diskusi Kelompok Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta

No.	Pembahasan	Permasalahan	Solusi
1.	Kapasitas politik	Perempuan masih lemah dalam kapasitas politik	Memberikan keterampilan komunikasi; membangun jejaring di internal partai politik dan organisasi politik perempuan; dan penguatan kepercayaan diri

No.	Pembahasan	Permasalahan	Solusi
2.	Kapasitas sosial	Perempuan masih belum dapat bersaing untuk memiliki modal sosial dengan laki-laki	Memberikan keterampilan sosial dengan memanfaatkan sosial media (facebook, Instagram, twitter dan lain-lain) dan kegiatan sosial di tingkat desa/kelurahan
3.	Kapasitas ekonomi	Perempuan masih lemah dalam pendanaan kegiatan politik dan sosial	Menguatkan kapasitas ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama dan keterampilan wirausaha untuk menguatkan jejaring ekonomi
4.	Kapasitas budaya	Perempuan masih dipandang tidak mampu menjadi pemimpin politik	Menguatkan peran kepemimpinan perempuan melalui pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat

Tahapan akhir dari kegiatan pelatihan adalah simulasi. Pada tahapan ini mitra diinstruksikan untuk melakukan kegiatan yang merefleksikan kejadian nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Tim membagi kelompok menjadi berdasarkan kejadian nyata yang akan disimulasikan oleh mitra. Tim menyusun tema besar yang terbagi dalam 4 (empat) sub yaitu terkait dengan kejadian/fenomena patriarki, subordinasi, beban ganda, dan pendanaan kampanye. Setelah membentuk kelompok, maka tim menginstruksikan mitra untuk bermain peran (role playing) sesuai dengan setiap tema yang dipilih. Setiap mitra akan mempresentasikan role playing di hadapan audien dan tim. Setelah selesai role playing maka, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menilai dan bertanya kepada kelompok yang telah mempresentasikan perannya (untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6 di bawah).

Tabel 6. Simulasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kasus	Permasalahan	Simulasi
1.	Patriarki	Hambatan patriarki masih menjadi hambatan utama perempuan untuk membangun kapasitas dan menjadi pemimpin	Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempraktikkan hambatan dari sebagian masyarakat yang tidak setuju perempuan menjadi calon ketua RT/RW, dan Kepala Desa
2.	Subordinasi	Perilaku dan perlakuan elite untuk menempatkan perempuan sebagai bawahan dan tidak memiliki kapasitas pemimpin	Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mensimulasikan pemilihan Pengurus Partai Politik
3.	Beban Ganda Perempuan	Kapasitas kader politik perempuan masih terbelenggu oleh tugas keluarga dan meniti karir politik	Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mensimulasikan solusi bagi kader partai politik perempuan antara keluarga dan politik
4.	Pendanaan Kampanye	Pendanaan sering menjadi hambatan utama bagi kader partai perempuan dalam membangun kapasitas kepemimpinan politik dalam kontestasi pemilu legislatif	Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mensimulasikan solusi bagi kader partai politik perempuan untuk mengatasi masalah kebutuhan dana yang besar dalam kampanye pemilu legislatif

Dari rangkaian tahapan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Terdapat temuan penting selama proses pelatihan ini. Secara umum temuan penting adalah bahwa mitra atau para kader partai politik perempuan mengalami peningkatan pemahaman politik khususnya konsep kepemimpinan politik. Mitra mengerti dan memahami strategi pendekatan kepada masyarakat penting untuk memenangkan pemilihan

umum legislatif. Konsep kepemimpinan politik ternyata menjadi titik lemah para kader partai politik perempuan dalam upaya memenangkan pemilihan anggota legislatif khususnya di provinsi DKI Jakarta. Para kader partai politik perempuan setelah pelatihan lebih memahami dan dapat mengantisipasi kejadian dan permasalahan dalam kompetisi pemilu legislatif. Pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini menjadi bahan dan bekal ilmu bagi para kader untuk menyusun strategi baik sosial dan politik dalam menghadapi kontestasi pemilu selanjutnya.



Gambar 1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Mempersiapkan Kontestasi Pemilu

SIMPULAN

Kader partai politik perempuan masih mengalami hambatan dan tantangan dalam meningkatkan keterwakilan politik di lembaga legislatif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor baik politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dominasi peran politik laki-laki baik di internal partai politik dan lembaga legislatif laki-laki juga menjadi faktor eksternal. Faktor lain yang menentukan adalah terkait dengan kapasitas kepemimpinan. Para kader partai politik perempuan umumnya masih lemah dalam kapasitas kepemimpinan politik. Tentunya faktor ini telah menjadi permasalahan utama dan perlu mendapatkan solusi. Salah satu solusi adalah pendidikan politik dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan politik.

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan kader partai politik perempuan dipercaya dapat membantu para kader partai politik perempuan. Tim telah melakukan monitoring dan evaluasi setelah pelatihan. Tim telah mengevaluasi bahwa mitra sebagai penerima manfaat dari pelatihan ini telah membuat beberapa kemajuan. Kemajuan paling terlihat adalah peningkatan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik sangat erat atau berkaitan dengan aspek lainnya yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Dengan penguasaan konsep-konsep ini dan pengalaman selama melakukan simulasi akan memberikan nilai tambah bagi para kader partai politik perempuan dalam mempersiapkan strategi kemenangan pemilu pada periode berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan kader partai politik perempuan. Tim mengucapkan terima kasih telah ditunjuk dan dipercaya untuk berperan sebagai narasumber/fasilitator selama kegiatan pelatihan ini berlangsung.

REFERENSI

- Agustin, M. N. &, & Sari, M. M. K. (2016). Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1073–1088.
- Ahmad, E., & Suryadi, K. (2020). *The Impact of Party Political Education on Cadre Political Attitudes*. 418(Acec 2019), 481–485. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.091>
- Asmorojati, A. W., & Muhammadi, F. (2021). Law, Politics, and Women: How were Aisyiyah's Cadres Involved in the Party? *Varia Justicia*, 17(1), 19–40. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/4573%0Ahttp://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/4573/2282>
- Dickson Omondi. (2016). The Role of Political Parties in Promoting Women's Political Participation. In *Gender Equality and Political Processes in Kenya*.
- Hariyanti, et al. (2018a). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>
- Hariyanti, et al. (2018b). *The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education*. 251(2), 548–552. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.123>
- Hijran, et al. (2018). *The Role of Political Parties in the Political Education of Party Cadres to Form Responsible Characters: Case study on the DPD Party Gerindra West Java*. 251(Acec), 624–627. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.139>
- Jandevi, U. (2019). Communication strategy to improve women's political participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 1(2), 68–81. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i2.46>
- Krook, M. L., & Norris, P. (2014). Beyond quotas: Strategies to promote gender equality in elected office. *Political Studies*, 62(1), 2–20. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12116>
- Nurdin. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 129–145.
- Paryati, et al. (2021). *Political Capacity Development Of Nasdem Party Women Legislator Candidates In The 2019 Legislative Election In South Sulawesi*. 4(1), 134–141.
- Roviana, S. (2015). Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2). <https://www.neliti.com/publications/131795/pendidikan-politik-koalisi-perempuan-yogyakarta-wilayah-yogyakarta-2000-2008>
- Santhosh Kumar, S. (2012). Capacity building through women groups. *Journal of Rural Development*, 31(2), 235–243.
- Sinta, et al. (2017) Sebagai Model Pendidikan Politik Kader Partai (Studi Pada Kader Perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Educitizen, 2(1), 56–65. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/civic/article/view/11944>
- Soedarwo, et al. (2020). Pendidikan Politik Berbasis Sensitivitas Gender Dalam Partai Politik Di Indonesia Dan India Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah

Malang Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah
Malang Program Studi Ilmu Hubungan Intern. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1),
48–60.

Sweetman, C. (2000). *Women and Leadership*. <http://www.tandf.co.uk>

Vina Salviana Darvina Soedarwo, W. (2015). *An Integrative-Participative Model For
Strengthening National Knowledge and Political Education to Cadres and
Constituents of Political Parties*.

Wakahiu and Keller. (2011). Full Length Research Paper Capacity Building : A
Phenomenological Study of the African Women Perceptions and Experiences in the
Leadership Training Program. *Journal of Occupational and Organizational
Psychology*, 84(3), 425–439. <http://doi.wiley.com/10.1111/j.2044-8325.2011.02034.x>
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=23264156&site=ehost-live>
<http://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/view/979>
<http://doi.wiley.com/10.1111/j.2044-8325.2011.020>